

# Gagalkah Program 100 Hari?

Oleh Purbayu Budi Santosa

**FORUM** Petisi 28 menilai program 100 hari pertama pemerintahan SBY-Boediono belum berhasil memenuhi harapan rakyat. Menurut kelompok itu, yang beranggotakan 28 tokoh berbagai LSM dan akademisi, berbagai persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia sekarang ini adalah fakta, bukan gosip, fitnah atau asumsi, yang tidak mampu diselesaikan oleh pemerintah SBY. Empat krisis yang dihadapi SBY semenjak berkuasa, yaitu krisis kebangsaan, , kene-garaan, kesejahteraan, dan krisis moral. (SM, 4 Januari 2010).



Sewaktu memulai memimpin Indonesia dengan Kabinet Indonesia Bersatu (KIB) II Presiden SBY menetapkan program 100 hari pemerintahannya, meliputi 45 program penting yang akan dijalankan berkaitan dengan pembangunan sektoral dan regional. Dari 45 program aksi tersebut, Presiden menetapkan 15 di antaranya disebut program pilihan yang wajib diimplementasikan dalam jangka waktu 100 hari pertama.

Program pilihan yang pertama adalah pemberantasan mafia hukum. Penetapan program pilihan pertama ini sungguh menarik, karena selama kurang lebih dua bulan KIB II berjalan banyak berkaitan dengan ranah hukum, yaitu masalah konflik KPK-Polri dan terakhir yang begitu membahana adalah kasus Bank Century. Pola pemikiran pemerintahan SBY ini sebenarnya begitu tepat, karena masalah apapun di Indonesia tidak akan dapat diselesaikan kalau masalah hukum masih lemah, di mana korupsi masih merajalela.

Program-program pilihan lainnya dari 100 hari pertama di antaranya revitalisasi industri pertahanan, penanggulangan terorisme, mengatasi permasalahan listrik, meningkatkan produksi dan ketahanan pangan, revitalisasi pabrik pupuk dan gula, pembenahan kompleksitas penggunaan tanah dan tata ruang, peningkatan infrastruktur, meningkatkan p i n j a m a n UMKM yang dikaitkan dengan KUR,

pendanaan, penanggulangan perubahan iklim dan lingkungan, reformasi kesehatan dengan mengubah paradigma masyarakat, reformasi di bidang pendidikan, dan penanggulangan bencana alam. Program pilihan terakhir adalah koordinasi yang erat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pembangunan segala bidang.

Program pilihan lainnya yang wajib diimplementasikan berkaitan secara langsung ataupun tidak dengan pembangunan ekonomi. Pemerintah lewat Presiden SBY ketika membuka National Summit 2009 di Hotel Bidakara beberapa waktu lalu menargetkan pertumbuhan ekonomi selama 5 tahun ke depan hingga 2014 mencapai 7 %. Selain itu, menargetkan penurunan angka pengangguran ke level 5 %-6 % dari 7% -8 % pada tahun 2009 dan angka kemiskinan ditargetkan turun dari 14%-15% pada tahun 2009 menjadi 8%-10% pada tahun 2014.

## Hukum

Pemerintahan SBY

meskipun telah menetapkan program kerja 100 hari yang sangat baik, anehnya justru terperangkap pada masalah hukum, yang dari kasus Bank Century dengan bukunya a



George Junus Aditjondro yaitu *Gurita Cikeas*, mengesankan seolah-olah kemenangannya dilakukan dengan tidak memakai cara-cara yang benar. Babak akhir dari kasus Bank Century akan menentukan sukses tidaknya SBY memimpin Indonesia untuk jilid kedua.

Jika diuraikan dari Petisi 28 yang ditujukan kepada pemerintahannya SBY, pertama, krisis kebangsaan, di mana sekarang ini harga diri bangsa Indonesia mengalami penurunan drastis dan hanya dipersembahkan kepada bangsa lain. Kedua, krisis kenegaraan disebabkan akibat amandemen UUD 1945 yang amburadul, dengan indikasi banyak UU yang bertabrakan dengan UUD, sehingga berakibat terjadinya anarkisme kenegaraan.

Ketiga, krisis kesejahteraan dengan fakta rakyat sengsara, sementara para pejabat hidup berkelebihan. Keempat, krisis moral, di mana para pejabat tidak bisa memberikan teladan yang baik kepada masyarakat karena mereka sendiri tidak bermoral. Sebenarnya keempat krisis yang dikemukakan tersebut adalah karena sifat bangsa Indonesia yang senang berpikir jangka pendek dan kurang berpikir dalam wawasan jangka panjang. Meskipun berbagai program jangka panjang telah ditetapkan, sering sekali dilanggarnya, mengingat kepentingan sesaat yang harus dicapai sehingga menghalalkan segala cara.

Sekarang ini di dunia ini secara umum tidaklah tepat memakai cara-cara kekerasan untuk menguasai suatu negara beserta rakyatnya, seperti penjajahan dan aneksasi dengan cara-cara brutal. Cara-cara hegemoni secara halus dilakukan dengan memakai strategi budaya, di mana kunci-kunci utama harus ditaklukkan untuk menguasai cara-cara berpikir, yang nantinya akan menjerumuskan nasib negara dan rakyatnya.

Para pemimpin Indonesia sangat dihormati oleh mayoritas rakyatnya, sehingga beliau dapat sebagai panutan. Dijadikannya sebagai panutan dapat salah atau benar, akan tetapi kebanyakan masyarakat akan berkaca kepada para pemimpinnya. Anehnya lagi ketika pemimpin menjabat semuanya ingin dekat supaya dapat keuntungan, tetapi begitu jatuh semua menjauh, bahkan dapat berbalik menghujatnya.

Bekerja keras dan pantang menyerah sebagai sifat seorang wiraswasta kurang dimiliki oleh sebagian besar masyarakat, terkadang justru menyerah pada pihak lain yang memberikan iming-iming hadiah tertentu.

Studi Lombard dari Perancis tentang aktivitas perdagangan dari orang-orang Asia di Samudera Hindia dan Laut China pada abad 13 sampai 19, di mana hasilnya bangsa Nusantara hanya mampu sebagai penguasa jalur-jalur ekonomi, bukan sebagai pelaku ekonomi.

## Gagalkah...

(Sambungan hlm 6)

Artinya yang dilakukan oleh kebanyakan bangsa kita pada waktu itu adalah mengharapkan retribusi (upeti) dari para pengguna jasa pelayaran, bukan sebagai seorang wiraswasta.

Studi Sutherland tentang elite politik di Jawa juga menunjukkan hasil yang serupa di mana dalam pergantian kekuasaan, hanya kulit luarnya saja yang berubah, intinya tetap saja sama yaitu siapa yang berkuasa, siapa yang mendapatkan keuntungan. Para pemimpin yang sedang menjalankan tugasnya begitu mengharap penghasilan tambahan di luar gaji pokoknya, yang bisa lebih besar.

Perangkap ini dalam bidang ekonomi lebih dirahkan kepada penguasaan materi lebih utama dari cara-cara mencapainya. Ajaran Neoklasik mengungkapkan hal ini, di mana efisiensi menjadi kiblat pokok pencapaian, adapun moral dan etika tidaklah mendapat porsi utama. Jika hal ini dilakukan bukan mustahil, apa yang dikatakan dan apa yang dikerjakan akan mempunyai senjang yang begitu jauh.

John Perkins (2005) selaku konsultan Bank Dunia mengaku bahwa dirinya dahulu diminta untuk memperangkap negara-negara yang kaya sumber daya alam dengan berbagai cara asal tujuan penguasaan negara lain oleh negara maju dapat berjalan. Indonesia menurutnya paling mudah dikuasai, karena dengan iming-iming utang dan terbukti sekitar 30 persen dikorupsi oleh para pejabat, maka penguasaan kekayaan Indonesia begitu mudah. Akibatnya hanya segelintir kecil masyarakat Indonesia hidup berkelebihan, sementara mayoritas rakyatnya masih hidup dengan aneka kemiskinan dan pengangguran yang merajalela.

Menjawab pertanyaan gagalkah program 100 hari KIB II tentunya dapat terjadi multitafsir. Paling tidak SBY harus dapat membuktikan bahwa pemberantasan mafia hukum yang berkelindan dengan korupsi harus dapat dijalankan, sesuai dengan program utamanya. Perangkap negara lain dengan cara-cara halus harus dapat disingkirkan, karena kemandirian Indonesia merupakan suatu keharusan, kalau Indonesia ingin maju, sejahtera berdaulat, dan berkedudukan terhormat dalam percaturan dunia. Tetapi sekiranya bukunya George J Aditjondro benar, maka akumulasi korban ada padanya. Almarhum Lombard dan Sutherland barangkali senyusenyum di alam akhirat melihat drama negara Indonesia. (10)

— Purbayu Budi Santosa, guru besar Fakultas Ekonomi Undip, yang menekuni ekonomi kelembagaan

